



Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Leverage* Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Csr) Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)

Husniatus Zahroh

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit

Hartono

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit

Nur Ainiyah

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit

Tatas Ridho Nugroho

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit

Korespondensi penulis : husniatus2112000@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the effect of Ownership Institutional, Leverage, and Size Board Commissioner on CSR disclosure with Company Size as variable moderation. Population in this study is company Mining listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2022, Samples obtained as many as 48 of 12 companies, taking sample use technique Purposive Sampling. Data used on study This is secondary data. Data analysis study this using an alternative structural equation modeling (SEM) using SmartPLS. The results of this study show Size Board Commissioner have a positive significant on CSR disclosure with level significant of $0,041 < 0,05$. Institutional Ownership and Leverage have no effect on CSR disclosure. Company size cannot moderate Institutional Ownership, Leverage and Board of Commissioners Size on CSR disclosure.*

Keywords: *Disclosure of CSR, Leverage, Institutional Ownership, Size of the Board of Commissioners, Company Size*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *CSR* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022, Sampel yang diperoleh sebanyak 48 sampel dari 12 perusahaan, pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data skunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model alternative structural equation modeling (SEM) menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *CSR* dengan tingkat signifikan sebesar $0,041 < 0,05$. Kepemilikan Institusional dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *CSR*. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi Kepemilikan Institusional, *Leverage* dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *CSR*.

Kata Kunci: Pengungkapan *CSR*, *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan

PENDAHULUAN

Konsep *Triple bottom line* yang menyatakan sebuah unit bisnis tidak hanya diukur berdasarkan margin ataupun laba (*profit*), tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*) (Rivandi, 2021). Hal ini yang melatar belakangi mengapa pengungkapan *CSR* telah menjadi esensial bagi perusahaan masa kini. *CSR* adalah

bentuk loyalitas perusahaan untuk beroperasi secara berkesinambungan dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat, lingkungan, dan berbagai pemangku kepentingan (Ahmadi et al., 2022). Pada lingkup usaha yang kompetitif dan dinamis, reputasi entitas bisnis adalah salah satu aset paling berharga. Pengungkapan CSR yang konsisten dan transparan membantu membangun citra positif perusahaan di mata publik. Pemangku kepentingan, seperti konsumen, investor, pemerintah, dan masyarakat umum, semakin sadar akan implikasi bisnis terhadap isu-isu berkelanjutan seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, ketidaksetaraan sosial, dan lingkungan hidup.

Regulasi dan tuntutan hukum juga turut mendorong pentingnya pengungkapan CSR. Banyak negara telah menerapkan aturan yang mengharuskan perusahaan melaporkan praktek CSR mereka. Pengungkapan ini bukan hanya menghindarkan perusahaan dari risiko hukum, tetapi juga menciptakan ketertiban dalam bisnis dan mendorong perusahaan untuk mengikuti standar-standar etika dan berkelanjutan. Regulasi mengenai pengungkapan CSR di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Peraturan pemerintah tahun No. 47 Tahun 2012 pasal 2. Dalam peraturan tersebut memperlihatkan bentuk kepedulian pemerintah terhadap hambatan-hambatan sosial perusahaan, akan tetapi belum ada batasan ketetapan standar mengenai banyaknya jumlah tanggung jawab sosial yang pasti diungkapkan oleh perusahaan.

Mengutip dari studi yang dilakukan oleh Loh & Thomas (2020) yang berjudul “Sustainability Reporting in ASEAN Countries” menyajikan rata-rata tingkat pengungkapan CSR dari aspek EES (Economic, Environment, and Social) pada perusahaan yang tercatat di BEI. Studi tersebut menunjukkan tingkat pengungkapan perusahaan yang tergabung di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam pada periode 2020. Dari studi tersebut dapat diketahui indonesia menempati posisi terendah dalam pengungkapan CSR dibanding dengan negara ASEAN lainnya.

Tabel 1

Tingkat CSR pada Topik Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial

	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand	Vietnam
Rata- rata Pengungkapan Ekonomi	50,0%	74,0%	87,0%	65,0%	59,0%	51,2%
Rata- rata Pengungkapan Lingkungan	70,0%	91,0%	94,0%	95,0%	85,0%	78,0%
Rata- rata Pengungkapan Sosial	99,0%	99,0%	100,0%	100,0%	99,0%	100,0%

Sumber: Sustainability Reporting in ASEAN Countries, 2020

Menuurut UUPIT No 40 tahun 2007 Pasal 74 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Salah satu perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis yang signifikan terkait dengan sumber daya alam adalah industri pertambangan (Shafira et al., 2021). Kegiatan pertambangan seringkali melibatkan eksploitasi sumber daya alam seperti mineral, logam, dan bahan tambang lainnya. Karena sifat operasionalnya yang berpotensi memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga bisnis pertambangan harus mempraktekkan tanggung jawab sosial dan pengelolaan lingkungan.

Banyaknya fenomena terkait permasalahan yang berhubungan dengan CSR pada perusahaan pertambangan antara lain seperti, di sepanjang di tahun 2019 tercatat 11 kasus pencemaran oleh industri pertambangan dan tahun 2020 kasus pencemaran meningkat empat kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 45 konflik dimana diantaranya mencemarkan tanah seluas 714.692 Ha (Dea A, 2021). Dengan luas tambang 100 ha, PT Timah Tbk menyelesaikan reklamasi pascatambang di Desa Mapur, Kecamatan Riasulip, Kabupaten Bangka pada tahun 2018–2019. Namun, hanya 10 hektar yang dipulihkan, dan tanah yang tersisa dibiarkan dalam keadaan berlubang. (Gunandha, 2020).

Dengan adanya fenomena tersebut menunjukkan bahwa keperdulian perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan bisnisnya sangat rendah. Disinilah peran pengungkapan CSR diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan serta sebagai alat komunikasi perusahaan dengan masyarakat maupun para stakeholder yang merasakan dampaknya terkait tanggung jawabnya. Menurut teori legitimasi perusahaan mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial mereka untuk mendapatkan dukungan dari lingkungan di mana mereka berada (Rivandi, 2021). Legitimasi mengacu pada upaya perusahaan untuk membangun dan menjaga citra positif serta dapat diterima oleh masyarakat dengan cara mengesankan bahwa tindakan dan kegiatan mereka sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang diakui. Dengan memperoleh legitimasi dari masyarakat perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, memperluas jangkauan pasar, mengurangi risiko yang berkaitan dengan regulasi, dan meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan.

Para peneliti sebelumnya telah mengkaji terkait pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dan berusaha untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Dalam penelitian terdahulu faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR melibatkan beberapa variabel seperti Kepemilikan Institusional, Leverage dan Ukuran Dewan Komisaris. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya didapatkan hasil yang tidak konsisten mendorong peneliti untuk menguji kembali variabel Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan menambahkan variabel Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yang bertujuan untuk memperjelas hubungan antara variabel-variabel yang telah di uji oleh peneliti terdahulu. Variabel moderasi membantu menjelaskan variasi yang lebih besar dalam hubungan antara dua variabel yang terkait. Dengan mempertimbangkan pengaruh variabel moderasi akan dapat memahami bagaimana hubungan antara dua variabel utama dapat berbeda di berbagai konteks atau kondisi.

Kepemilikan institusional yang lebih tinggi pada suatu perusahaan dapat memberikan insentif tambahan bagi perusahaan untuk lebih aktif dalam pengungkapan CSR karena para pemegang saham institusional dapat memberikan tekanan dan mengharapkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Dengan adanya pengungkapan CSR dapat mencerminkan praktik manajemen yang lebih baik dan dapat dianggap sebagai sinyal positif bagi calon investor institusional lainnya untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut. Kepemilikan institusional yang lebih tinggi dapat mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam mengungkapkan informasi CSR mereka untuk memperkuat hubungan dengan investor institusional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanty et al., (2021) dan Rivandi (2021) menunjukkan kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Shafira et al. (2021) menunjukkan tidak ada pengaruh antara Kepemilikan Institusional dengan pengungkapan CSR.

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tingkat *leverage* dapat menggambarkan risiko keuangan perusahaan. Perusahaan dengan *leverage* tinggi mungkin akan mencari cara untuk mempertahankan atau meningkatkan legitimasi mereka dalam situasi finansial yang sulit. Pengungkapan CSR yang lebih luas dan transparan dapat dianggap sebagai upaya untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial, sehingga dapat membantu memperkuat citra positif perusahaan di mata stakeholders. Menurut teori stakeholder menyatakan bahwa semakin tinggi *leverage* pada perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak informasi. Sehingga, perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung mengungkapkan CSR lebih luas dibandingkan perusahaan yang memiliki *leverage* rendah. perusahaan dengan *Leverage* yang lebih tinggi lebih cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi sukarela mereka karena perusahaan-perusahaan ini perlu melegitimasi aktivitas mereka kepada pemangku kepentingan.

Dengan melakukan pengungkapan CSR, perusahaan dapat membangun citra yang positif, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan mengurangi potensi risiko reputasi dan operasional yang dapat muncul akibat tuntutan sosial dan lingkungan. penelitian yang dilakukan Firdausi & Prihandana (2022) dan Irmayanti & Mimba (2018) menunjukkan arah positif signifikan antara *Leverage* terhadap pengungkapan CSR. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Dipasti & Sulistyowati (2022) menunjukkan tidak adanya pengaruh antara *Leverage* terhadap pengungkapan CSR.

H2: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dewan Komisaris adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan serta memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan. Semakin besar ukuran dewan komisaris suatu perusahaan, semakin banyak pula pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Chen, 2019). Ukuran dewan komisaris yang besar dapat memperkuat kontrol dan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengungkapkan program CSR. Semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin banyak pula perspektif yang berbeda-beda dalam pengambilan keputusan, sehingga perusahaan cenderung lebih hati-hati dalam melakukan pengungkapan CSR, dan lebih mungkin untuk melakukan pengungkapan CSR secara luas. penelitian yang di lakukan Shafira et al. (2021) dan Dipasti & Sulistyowati (2022) menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Dewanti & Afif (2022) menunjukkan tidak adanya pengaruh antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan CSR.

H3: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Institusi keuangan besar yang memiliki kepemilikan institusional yang kuat cenderung memiliki pandangan jangka panjang terhadap investasi mereka. Mereka ingin memastikan bahwa perusahaan yang mereka investasikan berkinerja baik dalam jangka panjang dan memiliki dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini, perusahaan yang lebih besar memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang ini dengan lebih baik, karena ukuran perusahaan yang besar memungkinkan untuk berinvestasi dalam perubahan berkelanjutan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi kemungkinan struktur kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Karena perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang besar dan kemungkinan sahamnya di miliki oleh banyak pihak antara lain kepemilikan Institusional. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf et al. (2022)

menunjukkan ukuran perusahaan dapat memoderasi kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR.

H4: Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dalam teori stakeholder, rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena tanggung jawab perusahaan terhadap para stakeholdernya seperti kreditur dan investor akan lebih besar sehingga mempermudah dalam permodalannya. Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi akan berusaha melaksanakan CSR lebih besar untuk memberikan kepercayaan terhadap para stakeholdernya. Perusahaan besar akan termotivasi untuk terus melaksanakan pengungkapan CSR, sehingga pihak manajemen akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengungkapan CSR yang telah dilaksanakan. Hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti & Mimba (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi *leverage* terhadap pengungkapan CSR.

H5: Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Semakin besar ukuran perusahaan membuat perusahaan akan melakukan pengungkapan CSR yang lebih besar Yuliawati & Sukirman (2015). Perusahaan dengan total aset yang besar biasanya memiliki sumber daya finansial dan operasional yang lebih besar. Ini memungkinkan perusahaan besar memiliki kapabilitas untuk melaksanakan program CSR yang lebih luas. Dewan komisaris, sebagai badan pengawas perusahaan, dapat memastikan alokasi sumber daya yang tepat untuk inisiatif CSR yang sesuai dengan skala operasional perusahaan. Dalam hal ini, Dewan Komisaris dapat memastikan bahwa perusahaan mengelola dana dan sumber daya yang diperlukan dengan baik untuk mencapai tujuan CSR yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas operasional perusahaan. Sehingga besarnya ukuran perusahaan akan memperkuat Ukuran dewan Komisaris terhadap penungkapan CSR .

H6: Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

KAJIAN LITERATUR

Teori Legitimasi

Dowling dan Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa tujuan gagasan legitimasi pada perusahaan adalah untuk menyelaraskan nilai-nilai sosial yang ada dalam aktivitas perusahaan dan norma-norma sosial yang ada di lingkungan sosial di mana perusahaan berdiri (Shafira et al., 2021). Legitimasi menjelaskan hubungan kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat sekitar perusahaan, jika terjadi ketidaksesuaian antara isi kontrak dengan pelaksana maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya. Teori legitimasi dalam aktivitas bisnis menciptakan batasan yang ditentukan oleh norma, nilai sosial dan reaksi terhadap batasan yang dapat mendorong pentingnya perilaku organisasi sehubungan dengan lingkungan (Yusuf et al., 2022).

Teori Agency

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *Agency theory* atau teori keagenan merupakan hubungan kontrak antara manajer yang di sebut (agen) dan pemegang saham (principal) (Nadifah et al., 2020). Kedua pihak yang menyatakan hak dan kewajiban masing

masing. Pihak pemegang saham (principal) menyajikan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan. Sedangkan pihak manajer (agen) memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang di intruksikan pemegang saham kepadanya. Dari kepentingan yang dilakukan oleh dua pihak tersebut pihak pemegang saham (principal) akan memperoleh pembagian berupa laba, sedangkan pihak manajer (agen) memperoleh gaji, bonus serta kompensasi lainnya. Tarik menarik kepentingan di antara principal dan agen akan memunculkan masalah yang disebut dengan *Asymmenric Information* (AI) yaitu dimana distribusi informasi yang tidak sama antara principal dan agen sehingga menimbulkan ketidakseimbangan informasi (Rivandi, 2021).

Teori Stakeholder

Semua pihak, baik internal maupun eksternal, yang memiliki hubungan dengan perusahaan dan secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi olehnya, pihak-pihak tersebut dianggap sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingannya karena mereka adalah pihak yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap operasi perusahaan dan kebijakan yang diambil dan dipraktikkan oleh perusahaan (Rivandi, 2021). Teori pemangku kepentingan (stakeholder theory) juga mempertimbangkan banyak kelompok sosial yang ada dan bagaimana ekspektasi mereka terkait dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan baik kecil maupun besar.

Teori ini berimplikasi kepada kebijakan manajemen dalam mengelola harapan stakeholder. Dalam konteks teori stakeholder, pengungkapan CSR berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan dan melibatkan stakeholder perusahaan. Dengan mengungkapkan aktivitas CSR mereka, perusahaan dapat menunjukkan bagaimana mereka memenuhi kepentingan dan harapan para stakeholder, serta bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang sering disebut dengan Tanggung Jawab Sosial, merupakan suatu konsep di mana perusahaan berusaha untuk mewujudkan kepedulian mereka terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan ekonomi ke dalam operasi bisnis mereka (Ulfa et al., 2022). Tujuan pengungkapan CSR ialah agar perusahaan bisa melaporkan tanggung jawab sosial yang dilaksanakannya pada setiap periodenya (Shafira et al., 2021). Pengungkapan CSR umumnya diukur menggunakan *standart Global Reporting Initiative* G4 (GRI-G4) yang dapat diakses melalui situs resmi GRI www.globalreporting.org. Di dalam standart GRI G4 memuat 3 Kategori pengungkapan yakni kategori ekonomi, lingkungan, dan sosial dimana kategori sosial dibagi menjadi sub bab seperti ketenagakerjaan, hak asasi manusia (HAM), masyarakat serta tanggung jawab atas produk, Setiap indikator tersebut diklasifikasikan kedalam beberapa indikator yang lebih kecil dengan jumlah 91 itemnya.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh lembaga-lembaga besar, seperti dana pensiun, dana investasi, bank, perusahaan asuransi, atau lembaga keuangan lainnya serta memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan dan sarana untuk memantau manajemen (Yusuf et al., 2022). Kepemilikan institusional terletak pada pengawasan dan pengaruh yang mereka miliki terhadap perusahaan di mana mereka memiliki saham. Para pemegang saham institusional biasanya memiliki kepentingan jangka panjang dalam kinerja perusahaan, karena hasil investasi mereka sering kali tergantung pada pertumbuhan dan kesehatan jangka panjang perusahaan tersebut. Ketika kepemilikan institusional tinggi, investor institusional akan mengerahkan lebih banyak upaya pemantauan untuk mengekang perilaku oportunistik manajer (Rivandi, 2021). Kepemilikan institusional ditentukan dari presentasi perbandingan total kepemilikan saham institusi dengan total saham beredar perusahaan.

Leverage

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang (Yovana & Kadir, 2020). *Leverage* memungkinkan perusahaan atau individu untuk menghasilkan hasil yang lebih besar daripada yang mungkin dicapai hanya dengan menggunakan modal sendiri. Terlalu banyak utang dapat membuat perusahaan lebih rentan terhadap fluktuasi pasar dan kesulitan keuangan, terutama jika pendapatan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban utang. Oleh karena itu, manajemen keuangan yang bijak diperlukan untuk mengelola tingkat *leverage* yang tepat sesuai dengan tujuan dan situasi perusahaan. *Leverage* pada penelitian ini menggunakan rasio DER (*debt to equity ratio*) yakni dari perbandingan antara liabilitas dan ekuitas.

Ukuran Dewan komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengambilan keputusan strategis dalam suatu perusahaan. Ukuran dewan komisaris dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan kebijakan perusahaan yang bersangkutan (Dewanti & Afif, 2022). Umumnya, dewan komisaris terdiri dari beberapa anggota dengan peran yang berbeda. Dewan komisaris menasihati direksi dan mengawasi praktik manajemen secara umum untuk korporasi dan operasinya. Pengawasan tersebut dilakukan sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan serta untuk kepentingan bisnis. Kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris dilakukan untuk kepentingan korporasi secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan individu atau organisasi tertentu (R. U. Dewi & Muslih, 2018). Ukuran dewan komisaris di dapat pada banyaknya jumlah dewan komisaris pada perusahaan terkait.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (size) adalah skala yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya suatu perusahaan (Yusuf et al. 2022). Ukuran perusahaan merupakan faktor yang sering digunakan untuk menggambarkan seberapa banyak informasi yang diungkapkan perusahaan, karena perusahaan yang memiliki ukuran yang besar menjadi sasaran pengawasan publik lebih dari bisnis kecil oleh karena itu mereka lebih cenderung untuk merilis lebih banyak informasi. menurut (Ulfa et al. 2022) Skala yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan adalah dengan menggunakan total aset yang ditransformasikan ke dalam bentuk logaritmik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang di pilih dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif asosiatif. metode asosiatif mengacu pada penggunaan metode untuk menganalisis hubungan atau asosiasi antara dua atau lebih variabel. Metode kuantitatif berfokus pada pengumpulan data dalam bentuk angka atau nilai numerik dan kemudian menerapkan analisis statistik untuk menguji hipotesis atau mengidentifikasi pola dalam data tersebut. Metode kuantitatif asosiatif sering digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel tersebut dan untuk menentukan apakah hubungan tersebut signifikan secara statistik (Sugiyono, 2019).

Model analisis data pada penelitian ini adalah analisis moderasi menggunakan smartPLS dengan metode *alternative Structural equation modeling* (SEM) yang didasarkan pada permodelan persamaan structural berdasarkan varians atau komponen. Jenis data yang digunakan merupakan data skunder yang didapat dari laporan keuangan serta laporan keberlanjutan perusahaan pertambangan yang di peroleh dari situs www.idx.com serta laman web resmi perusahaan terkait.

Populasi pada penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022 dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang di dasari pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebaga berikut ini:

1. Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022
2. Perusahaan pertambangan menyajikan laporan keuangan yang dapat di akses tahun 2019-2022.
3. Perusahaan pertambangan yang menyajikan laporan keberlanjutan yang dapat di akses tahun 2019-2022.

Setelah melakukan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang telah di tentukan didapatkan sampel sebanyak 48 yang terdiri dari 12 perusahaan pertambangan. Berikut ini merupakan perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini:

Tabel 2
Sampel Perusahaan

NO	KODE	PERUSAHAAN
1	PTRO	Petrosea Tbk.
2	ADRO	Adaro Energy Indonesia Tbk.
3	INDY	Indo Tambangraya Megah Tbk.
4	PTBA	Bukit Asam Tbk.
5	BUMI	Bumi Resources Tbk.
6	MYOH	Samindo Resources Tbk.
7	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk
8	DEWA	Darma Henwa Tbk.
9	ELSA	Elnusa Tbk.
10	ANTM	Aneka Tambang Tbk.
11	TINS	Timah Tbk.
12	INCO	Vale Indonesia Tbk.

Variabel penelitian merupakan Unsur atau faktor yang diamati dan diukur dalam suatu penelitian untuk mengidentifikasi hubungan, pengaruh, atau perbedaan kemudian dapat ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Sesuai dengan judul penelitian ini yakni pengaruh kepemilikan institusional, leverage dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan ukuran perusahaan sebagai variable pemoderasi. Oleh karena itu peneliti menggolongkan dalam kelompok variable independen (X), variable dependen (Y) seta variable moderasi (Z).

Variabel independen (X) merupakan variabel yang dianggap sebagai penyebab atau faktor yang mempengaruhi perubahan pada variabel lain yang yaitu variable dependen variable independen juga biasa di sebut dengan variable bebas. Pada penelitian ini terdapat 3 vriabel independen yakni kepemilikan institusional (X1), *leverage* (X2) dan ukuran dewan komisaris (X3). Variabel selanjutnya yang diggunakan pada penelitian ini adalah variable dependen. Variable dependen merupakan variabel dalam suatu penelitian atau eksperimen yang nilainya tergantung atau dipengaruhi oleh variabel lain yang disebut variabel independen. Pada penelitian ini yang mewakili variable dependen adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang disimbolkan dengan (Y). Variabel moderasi merupakan variable yang berperan sebagai penguat

ataupun memperlemah hubungan antara variable bebas dan terikat. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan merupakan kelompok variable moderasi (Z).

Analisis pada penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS). dalam PLS terdapat dua model pengukuran yakni outer model dan inner model. Outer model menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan indikator atau sebaliknya. Tujuan dari model ini adalah untuk menentukan validitas dan juga reliabilitas. Uji validitas diukur dengan menggunakan pengujian Convergent Validity dan Discriminant Validity. Dalam pengujian Convergent Validity nilai uji ini dapat dilihat melalui indicator pada *loading factor*. Indikator dikatakan valid untuk menjelaskan konstruk latennya apabila memiliki nilai *loading factor* > 0,5. Uji validitas yang kedua dapat dilihat pada Discriminant Validity yang terdiri dari nilai pada *Fornell-Larcker* dan *cross loading*. Standar *Fornell-Larcker* menunjukkan nilai AVE variabel laten harus lebih besar dari R^2 untuk semua variabel laten lainnya untuk memenuhi validitas diskriminan. Sementara itu pada *cross loading*, jika setiap item pada konstruk memiliki nilai loading lebih besar dari nilai *cross loading*nya maka hal ini memenuhi syarat yang telah di tentukan (Garson, 2016).

Pengujian selanjutnya adalah uji reliabilitas. Pada uji ini terdapat dua kriteria nilai yang harus dipenuhi yaitu pada *Composite reliability* dengan standar ketentuan nilai untuk *composite reliability* yakni > 0,8. Kemudian kriteria nilai selanjutnya yang harus dipenuhi dapat di lihat pada *Cronbach's alpha* digunakan untuk mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk dan memastikan nilai dari composite reliability. Standar ketentuan nilai untuk *cronbach's alpha* yakni > 0,6.

Model pengukuran PLS selanjutnya ialah inner model. pengujian model struktural atau inner model dilakukan dengan melihat hubungan antar konstruk Ada beberapa uji untuk model struktural yaitu: *R Square* (R^2), *Effect Size* (*F Square*), *Q Square* (Q^2), GoF, dan Uji Hiotesis (Garson, 2016). Berikut analisis lebih rinci masing-masing uji inner model:

Tabel 3

Pengukuran Inner Model

No	Model Struktural	Kriteria
1.	<i>R Square</i> (R^2)	1. 0,19 Lemah 2. 0,33 Moderat 3. 0,67 Kuat
2.	<i>Effect Size</i> (<i>F Square</i>)	1. 0,02 pengaruh lemah 2. 0,15 pengaruh sedang 3. 0,35 pengaruh kuat
3.	<i>Q Square</i> (Q^2),	$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2) \dots (1 - R_p^2)$
4.	GoF (<i>Goodness of Fit</i>)	$GoF = \sqrt{AVE \times R^2}$ 1. 0,1 Kecil 2. 0,25 Medium 3. 0,38 Besar
5.	Uji hipotesis	taraf signifikansi: 1. statistics > 1,96 (nilai Z-score normal) 2. p-value < 0,05

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4
Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Path	Original Sample (O)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistics (O/STDEV)	P Values	Indikasi
H1	X1 -> Y	-0,051	0,116	0,439	0,661	Tidak Signifikan
H2	X2 -> Y	0,199	0,694	0,287	0,774	Tidak Signifikan
H3	X3 -> Y	0,311	0,151	2,054	0,041	Signifikan
H4	Z*X1 -> Y	0,060	0,169	0,352	0,725	Tidak Signifikan
H5	Z*X2 -> Y	-0,388	0,840	0,462	0,644	Tidak Signifikan
H6	Z*X3 -> Y	-0,060	0,194	0,311	0,756	Tidak Signifikan

Kepemilikan Institusional merujuk pada saham perusahaan yang dimiliki oleh entitas ataupun lembaga besar seperti investasi, dana pensiun ataupun sejenisnya. Pada penelitian ini kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Dapat dijelaskan melalui tabel di atas menunjukkan nilai original sample sebesar -0,051 yang artinya memiliki arah negatif antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR, *t-statistics* sebesar 0,439 kurang dari 1,96 dan *p-value* sebesar 0,661 lebih dari 0,05. Maka dapat diartikan Ha pada penelitian ini di tolak dan H0 di terima.

Hal ini dapat terjadi karena tidak semua institusi memiliki fokus yang sama terhadap aspek tanggung jawab sosial perusahaan. Beberapa institusi mungkin lebih peduli terhadap aspek keuangan dan laba daripada masalah lingkungan atau sosial. Oleh karena itu, kepemilikan institusional tidak selalu akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR. Meskipun kepemilikan institusional bisa memiliki sejumlah saham besar dalam perusahaan, itu tidak selalu berarti mereka memiliki kendali penuh terhadap pengambilan keputusan strategis. Keputusan terkait CSR biasanya melibatkan manajemen eksekutif perusahaan dan pemegang saham utama lainnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shafira et al. (2021) dan Kirana & Prasetyo (2021) yang menemukan hasil tidak adanya pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR.

Leverage merujuk pada tingkat rasio utang yang dimiliki perusahaan. Pada penelitian ini *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Dapat dijelaskan melalui tabel di atas menunjukkan nilai original sample sebesar 0,199 yang artinya memiliki arah positif antara leverage terhadap pengungkapan CSR, kemudian nilai *t-statistics* sebesar 0,287 kurang dari 1,96 dan *p-value* sebesar 0,774 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan Ha pada penelitian ini di tolak dan H0 di terima.

Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi kemungkinan memiliki fokus lebih besar pada pembayaran bunga, pengurangan utang, dan pemenuhan kewajiban keuangan. Dalam situasi ini, pengungkapan CSR mungkin bukan prioritas utama karena perusahaan lebih berfokus pada masalah keuangan dan keberlanjutan operasional selain itu perusahaan dengan *leverage* tinggi mungkin menghadapi risiko keuangan yang lebih besar, terutama saat kondisi pasar atau ekonomi memburuk. Dalam situasi ini, upaya untuk menjaga stabilitas keuangan mungkin lebih dominan daripada pengungkapan CSR. Hal tersebut menunjukkan *leverage* perusahaan tidak

menjadi faktor penentu utama apakah perusahaan berkomitmen untuk mengungkapkan CSR. Dengan kata lain, besarnya tingkat *leverage* pada penelitian ini tidak mempengaruhi sejauh mana perusahaan tersebut akan mengungkapkan CSR. Penelitian ini sejalan dengan Ulfa et al. (2022) dan Kharisma & Sulistyowati (2022) yang menemukan hasil tidak adanya pengaruh antara *leverage* terhadap pengungkapan CSR.

Dewan komisaris adalah bagian dari struktur korporasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan dan membuat keputusan strategis penting, salah satunya dalam pengungkapan CSR. Pada penelitian ini ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dapat dijelaskan melalui tabel di atas menunjukkan nilai *original sample* sebesar 0,311 yang artinya memiliki arah positif antara ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR, kemudian nilai *t-statistics* sebesar 2,054 lebih dari 1,96 dan *p-value* sebesar 0,041 kurang dari 0,05. Maka dapat diartikan H_a pada penelitian ini di terima dan H_0 di tolak.

Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial, artinya semakin banyaknya dewan komisaris dalam suatu perusahaan akan meningkatkan pengungkapan CSR perusahaan, hal ini karena ketika suatu perusahaan memiliki jumlah dewan komisaris yang besar maka dewan komisaris memiliki power yang kuat untuk menekan manajemen dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial. Penelitian ini mendukung teori agensi yang mengungkapkan bahwa dewan komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas dalam kinerja perusahaan salah satunya dalam kinerja social perusahaan. Pada perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang banyak, maka akan mempermudah dalam mengendalikan manajemen untuk melakukan pengungkapan CSR. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shafira et al. (2021) dan Sihombing et al. (2020) yang menemukan hasil adanya pengaruh positif signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR.

Ukuran perusahaan yang diukur melalui total aset tidak dapat memperkuat kepemilikan institusional dalam memengaruhi tingkat pengungkapan CSR. Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham oleh lembaga atau organisasi besar seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, atau dana investasi dan sejenisnya. Dapat dijelaskan melalui tabel di atas menunjukkan nilai *original sample* sebesar 0,060 yang artinya memiliki arah positif antara Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan CSR, kemudian nilai *t-statistics* sebesar 0,352 kurang dari 1,96 dan *p-value* sebesar 0,725 lebih dari 0,05. Maka dapat diartikan H_a pada penelitian ini di tolak dan H_0 di terima.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf et al. (2022) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR. Kepemilikan institusional didasarkan pada pertimbangan investasi yang kompleks, beberapa pertimbangan tersebut bias saja meliputi analisis kinerja keuangan, potensi pertumbuhan, risiko industri, dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan tujuan investasi institusi. Ukuran perusahaan mungkin tidak menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan ini. Sehingga dalam hal ini ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR seringkali lebih dipengaruhi oleh komitmen manajemen terhadap tanggung jawab sosial daripada hanya ukuran perusahaan. Manajemen yang memiliki pandangan yang kuat terhadap isu-isu sosial dan lingkungan mungkin akan mendorong pengungkapan CSR yang kuat, terlepas dari ukuran perusahaan. Jenis moderasi pada hasil uji hipotesis ini merupakan jenis moderasi *Potensial/Homologizer*.

Ukuran perusahaan merujuk pada seberapa besar atau kecil perusahaan itu. Ukuran perusahaan dapat diukur melalui total aset perusahaan. Sedangkan *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan tingkat hutang perusahaan. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi *leverage* terhadap pengungkapan CSR. Dapat dijelaskan melalui tabel di atas menunjukkan nilai original sample sebesar -0,388 yang artinya memiliki arah negatif antara *leverage* terhadap pengungkapan CSR, kemudian nilai *t-statistics* sebesar 0,462 kurang dari 1,96 dan *p-value* sebesar 0,644 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan H_a pada penelitian ini ditolak dan H_0 diterima.

Besar kecilnya ukuran perusahaan masih belum bias menjamin pengungkapan CSR pada suatu perusahaan. Meskipun perusahaan besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya untuk melaksanakan inisiatif CSR, dan perusahaan kecil mungkin memiliki fleksibilitas dalam melakukan pengungkapan CSR, hal ini tidak menjamin bahwa perusahaan secara otomatis akan mengungkapkan informasi tentang praktik CSR mereka. Perusahaan mungkin akan berfokus pada pemenuhan kewajiban keuangan mereka sebelum mereka lebih aktif dalam mengungkapkan CSR mereka. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Budiasih (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi *leverage* terhadap pengungkapan CSR. Jenis moderasi pada hasil uji hipotesis ini merupakan jenis moderasi *Potensial/Homologizer*.

Pada penelitian ini ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR. Ukuran perusahaan merujuk pada seberapa besar atau kecil perusahaan itu. Ukuran perusahaan dapat diukur melalui total aset perusahaan. Sedangkan ukuran dewan komisaris merujuk pada banyaknya jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan. Dapat dijelaskan melalui tabel di atas menunjukkan nilai original sample sebesar -0,060 yang artinya memiliki arah negatif antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan CSR, kemudian nilai *t-statistics* sebesar 0,311 kurang dari 1,96 dan *p-value* sebesar 0,756 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan H_a pada penelitian ini ditolak dan H_0 diterima.

Dalam hal ini ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat pengaruh antara ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR. Ini mungkin terjadi karena keterlibatan dewan komisaris dalam pengambilan keputusan mengenai CSR tergantung pada struktur organisasi perusahaan dan kebijakan manajemen. Terkadang, perusahaan dengan total aset besar memiliki struktur organisasi yang kompleks dan pengambilan keputusan bisa menjadi lebih terpusat atau sulit dilibatkan, sehingga pengaruh dewan komisaris terhadap CSR mungkin terbatas. Pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR lebih berkaitan dengan komitmen, pemahaman, dan kesadaran mereka terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Ukuran perusahaan tidak selalu mencerminkan sejauh mana dewan komisaris memiliki komitmen untuk memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda & H. Afrizal (2016) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR. Jenis moderasi pada hasil uji hipotesis ini merupakan jenis moderasi *Potensial/Homologizer*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Mahboobeh Khan et al. 2022. "Examining the Relationship between Size of the Company , Ownership Structure , and Corporate Governance with Corporate Social Responsibility Disclosure in Iran."
- DA, Ady Thea. 2021. "Ini Empat Jenis Konflik Pertambangan Sepanjang Tahun 2020." *bukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-empat-jenis-konflik->

pertambangan-sepanjang-tahun-2020-lt600ff8e000976/?page=2 (March 25, 2023).

- Damayanty, Prisila -, Hendi Prihanto, and Fairuzzaman Fairuzzaman. 2021. "Pengaruh Good Corporate Governance, Kepemilikan Saham Publik Dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility." *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 7(2): 1.
- Dewanti, Indea, and Ahmad Sururi Afif. 2022. "Pengaruh Size , Ukuran Dewan Komisaris , ROA Dan Sales Growth Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)." 5: 4112–19.
- Dewi, Made Ayu Bintang Cyntia, and I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2021. "Profitabilitas, Leverage Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi." *E-Jurnal Akuntansi* 31(11): 2812.
- Dewi, Ratih Utami, and Muhammad Muslih. 2018. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)(Studi Empiris Pada Perusahaan Ritel Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)." *Kajian Akuntansi* 19(2): 212–20.
- Garson, G. David. 2016. Multi-Label Dimensionality Reduction *Partial Least Squares*.
- Gunadha, Reza. 2020. "100 Ha Lahan Pasca-Tambang PT Timah Di Babel Dibiarkan Rusak." *suara.com*. <https://www.suara.com/news/2020/07/25/214739/100-ha-lahan-pasca-tambang-pt-timah-di-babel-dibiarkan-rusak>.
- Kharisma, Vicky Oktavian, and Erna Sulistyowati. 2022. "Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)." *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* 7(2): 407.
- Kirana, Asyifa Dea, and Andrian Budi Prasetyo. 2021. "Analyzing Board Characteristics, Ownership Structure and Company Characteristic to CSR Disclosure." *Accounting Analysis Journal* 10(1): 62–70.
- Loh, Lawrence, and Thomas Thomas. 2020. "Corporate Sustainability Reporting in ASEAN Countries." *Centre of Governance and Sustainability* (December): 1–52. <https://bschool.nus.edu.sg/cgs/wp-content/uploads/sites/7/2021/07/ACN-CGS-Corporate-Sustainability-Reporting-in-ASEAN-Countries-Report-2020.pdf>.
- Nadifah, R, P D I Kusuma, and T Arofah. 2020. "The the Effect of Corporate Social Responsibility Disclosure, Leverage, and Free Cash Flow on Earnings Management." *Jos.Unsoed.Ac.Id* 05(Idx): 99–119. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/sar/article/view/3028%0Ahttp://jos.unsoed.ac.id/index.php/sar/article/download/3028/1791>.
- Nanda, Ulfa Luthfia, and H. Junaidi H. Afrizal. 2016. "Pengaruh Corortae Governence Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dengan Ukuran PPerusahaan Sebagai Variabel Moderasi."
- Rivandi, Muhammad. 2021. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 16(1): 21–40.
- Shafira, Reghita Nabilla, Siti Nur Azizah, Sri Wahyuni, and Hadi Pramono. 2021. "The Effect of Firm Size and Corporate Governance Structure on Corporate Social Responsibility

- Disclosures.” *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal* 2(2): 163–69.
- Sihombing, Tio, Herlina Banjarnahor, Winda Alfionita, and Deasy Aruna. 2020. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Dan Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan CSR.” *Quarterly Journal of Health Psychology* 8(32): 73–92. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Ulfa, Tria, Darwanis, and Fazli BZ Syam. 2022. “Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: Case of Mining Companies in Indonesia.” *International Journal of Research in Business and Social Science* 11(5): 324–34. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Yovana, Dina Gledis, and Abdul Kadir. 2020. “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR).” *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 21(1): 15–24.
- Yusuf, Muhammad et al. 2022. “The Effect of Ownership Structure and Iso 14001 Certification on Corporate Social Responsibility Disclosure with Company Size as A Moderating Variable.” *Central European Management Journal* 30: 145–56.